



**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 01/Pansel/Japati/03/2018**

**TENTANG  
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA (ESELON II.a) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. Ketentuan Umum**

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah :

No	Nama Jabatan	Eselon
1	Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	II.a
2	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan	II.a
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	II.a
4	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	II.a
5	Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi	II.a

B. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Dengan syarat kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk.I (IV/b);
  - b. Sekurang-kurangnya sedang atau telah dua tahun dalam jabatan administrator/struktural eselon III.a atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan;

- c. Sekurang-kurangnya sedang atau telah satu tahun dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a atau eselon II.b);
4. Berusia minimal 48 tahun dan maksimal 56 tahun per 1 Juni 2018;
5. Untuk jabatan Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan usia minimal 48 tahun dan maksimal 57 tahun per 1 Juli 2018;
6. Kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 atau setara;
7. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
8. Telah melaporkan LHKPN tahun terakhir;
9. Tanda terima penyerahan SPT satu tahun terakhir;
10. Tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/sedang;
11. Mendapat persetujuan dari atasan langsung;
12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani diatas materi Rp.6.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
13. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
14. Peserta hanya dapat melamar satu jabatan sesuai kompetensi yang telah dipersyaratkan.

### C. Persyaratan Khusus

1. Peserta Seleksi harus memiliki kemampuan:
  - a) Mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
  - b) Administrasi umum (*man, money, material*);
  - c) Memahami Teknologi Informasi.
2. Bagi Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Bagi Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, peserta harus memenuhi kompetensi teknis sebagai berikut:
  - a) Memiliki kemampuan dibidang pengawasan dan pemeriksaan dalam hal teknis dan SDM peradilan;
  - b) Sedang menduduki jabatan Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung RI.

4. Bagi Sekretaris Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, peserta harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :
  - a) Memiliki kemampuan memahami proses perencanaan, pelaksanaan anggaran dan organisasi, diutamakan yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta memahami proses pengadaan di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - b) Memiliki kemampuan mengelola data, arsip dan dokumentasi evaluasi pelaporan Peradilan Agama.
  
5. Bagi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, peserta harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :
  - a) Memiliki kemampuan membuat konsep perencanaan dan program, evaluasi pelaksanaan anggaran
  - b) Memiliki kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
  
6. Bagi Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, peserta harus memenuhi kompetensi teknis dibidang pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), diutamakan yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

## **II. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 8 s.d. 23 Maret 2018;
2. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi:
  - a. *Print out* registrasi pendaftaran *online*;
  - b. Surat Lamaran (format terlampir);
  - c. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
  - d. Foto Copy SK Pangkat terakhir dan SK jabatan yang disyaratkan;
  - e. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  - f. Foto Copy Ijazah terakhir;
  - g. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir;
  - h. Foto Copy Bukti telah menyampaikan LHKPN;
  - i. Foto Copy Sertifikasi keahlian yang dimiliki;
  - j. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - k. Surat pernyataan *Professional Exposure* (format terlampir);
  - l. Surat persetujuan dari atasan langsung (format terlampir);
  - m. Surat pernyataan tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/sedang yang

dibubuhi materai Rp6.000,- dan diketahui oleh atasan langsung disertai stempel dinas (format terlampir);

- Seluruh dokumen persyaratan administrasi harus disampaikan dalam amplop tertutup mulai tanggal 8 s.d. 23 Maret 2018 (cap pos) dan ditujukan kepada:

**PANITIA SELEKSI TERBUKA**  
**JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.a)**  
**PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**

**d/a. BIRO KEPEGAWAIAN BADAN URUSAN ADMINITRASI,**  
**MAHKAMAH AGUNG RI, GEDUNG G LT. 3**  
**JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA PUSAT KODE POS 10110**

### Tahapan Seleksi/Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)	Keterangan
1.	Pengumuman	5 s/d 16 Maret 2018	Diumumkan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI
2.	Pendaftaran secara Online dan Penerimaan Berkas Administrasi	8 s/d 23 Maret 2018	
3.	Seleksi Administrasi	26 Maret s/d 6 April 2018	
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	10 s/d 13 April 2018	
5.	<i>Assessment Center</i>	17 s/d 19 April 2018	
6.	Penilaian <i>Professional Exposure</i>	23 s/d 27 April 2018	
7.	Pengumuman Hasil <i>Assessment Center</i> dan Hasil Penilaian <i>Professional Exposure</i>	30 April s/d 4 Mei 2018	
8.	Penelusuran Rekam Jejak	2 s/d 9 Mei 2018	
9.	Penulisan Makalah dan Bahan Presentasi Makalah	14 s/d 16 Mei 2018	
10.	Penilaian Kompetensi (Presentasi dan Wawancara)	22 s/d 24 Mei 2018	
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	6 s/d 8 Juni 2018	

**Catatan:**

\*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Mahkamah Agung.

### III. Ketentuan lain

- Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, apabila persyaratan yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan maka dokumen/berkas tidak diproses;

2. Pendaftaran dilakukan melalui *website* resmi Mahkamah Agung RI dengan alamat **<http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>**;
3. Mahkamah Agung dan Panitia Seleksi tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a);
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
5. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi **<https://www.mahkamahagung.go.id>**;
6. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
7. Keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Mahkamah Agung RI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a), apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA PANITIA  
  
A. S. PUDJOHARSOYO



Lampiran I Pengumuman

Nomor :

Tanggal :

### FORMAT SURAT LAMARAN

Kota Domisili, tanggal, bulan, tahun

Yth. Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan  
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a)  
Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018

di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan lamaran sebagai .....\* dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam tata cara pendaftaran yaitu:

1. *Print out* Registrasi Pendaftaran *Online*;
2. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang berwarna merah;
3. Daftar Riwayat Hidup;
4. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir dan SK Jabatan yang disyaratkan;
5. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto Copy Ijazah terakhir;
7. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
8. Foto Copy bukti telah menyampaikan LHKPN;
9. Foto copy tanda terima SPT Pajak tahun terakhir;
10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter rumah sakit pemerintah;
11. Foto Copy sertifikasi keahlian yang disyaratkan atau dimiliki;
12. Surat pernyataan *Professional Exposure*;
13. Surat persetujuan dari atasan langsung;

14. Surat pernyataan tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/sedang;
15. Surat Pernyataan bersedia alih status/mengundurkan diri dari jabatan aktif TNI/Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

\*) Jabatan yang dilamar

Lampiran II Pengumuman  
Nomor :  
Tanggal :

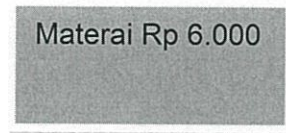
**SURAT PERNYATAAN  
PROFESSIONAL EXPOSURE**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Kementerian/Lembaga/Instansi :

Menyatakan bahwa data atau pernyataan yang saya cantumkan dalam formulir ini disusun dengan sebenar-benarnya berdasarkan yang sudah saya lakukan/alami dalam pekerjaan.

....., .....2018



Nama  
NIP



Lampiran III Pengumuman  
Nomor :  
Tanggal :

**SURAT KETERANGAN  
PERSETUJUAN ATASAN/PIMPINAN**

**Nomor :**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP/NRP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Disetujui untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kota Domisili, 2018

Atasan

Stempel dinas

Nama  
NIP

Tembusan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pelamar;
2. Eselon I instansi pelamar.

Lampiran IV Pengumuman  
Nomor :  
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH/TIDAK SEDANG DALAM PROSES DIJATUHI HUKUMAN PIDANA  
PENJARA, HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT/SEDANG  
Nomor :**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP/NRP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/sedang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Kota Domisili, 2018  
Atasan

Stempel dinas

Nama  
NIP